

MITIGASI EKOSISTEM POLITIK DESTRUKTIF: UPAYA GENERASI MUDA DALAM MENGATASI POLARISASI POLITIK BERBASIS MEDIA DIGITAL

Joey Dava Akbar Hanafiah Alby

Afiliasi; UIN Sunan Ampel Surabaya

Joey.dava@gmail.com

Andika Pratama Setiawan

Afiliasi; UIN Sunan Ampel Surabaya

andikapratama15.ap@gmail.com

Saila Rizqi Amalia Azhar

Afiliasi; UIN Sunan Ampel Surabaya

sailaazhar2002@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berisi studi tentang mitigasi polarisasi politik di media digital yang melibatkan generasi z. Polarisasi politik merupakan permasalahan yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan penduduk dalam jangka waktu yang panjang seperti yang terjadi pada pilkada DKI Jakarta 2016 dan pemilu 2019. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengambil dan mengkomparasikan data literatur seperti jurnal, hasil penelitian terdahulu, buku, dan pemberitaan media online. Hasil peneliti ini menemukan bahwa generasi z berusaha memitigasi permasalahan polarisasi politik menggunakan media digital, di antaranya; 1) generasi z harus mampu menjadi agent of social control dan bertindak sebagai edukator politik melalui media sosial dan memposisikan diri sebagai wise content creator; 2) Anak muda sebagai antitesis praktek buzzer yang cenderung membuat narasi yang merusak integrasi masyarakat; 3) Anak muda khususnya gen z yang dikenal sebagai linkster generation yang mempunyai pemahaman literasi digital yang baik mampu turut andil dalam mengurangi efek filter bubble dalam algoritma media sosial, sehingga transmisi pesan/ konten yang disampaikan berkenaan dengan politik konstruktif mampu tersebar dalam algoritma media sosial yang dikonsumsi bebas oleh khalayak umum.

kata kunci: *Polarisasi Politik, Generasi Z, Media Digital*

Abstract

This research contains a study on mitigating political polarisation in digital media involving generation z. Political polarisation is a problem that can lead to conflict and division of the population in the long term as happened in the

Copyright: © 2024. Joey Dava Akbar Hanafiah Alby, Andika Pratama Setiawan, Saila Rizqi Amalia Azhar.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

2016 DKI Jakarta elections and the 2019 elections. This research is a literature study conducted by taking and comparing literature data such as journals, previous research results, books, and online media coverage. The results of this research found that generation z tried to mitigate the problem of political polarisation using digital media, including; 1) generation z must be able to become an agent of social control and act as a political educator through social media and position themselves as wise content creators; 2) Young people as the antithesis of buzzer practices that tend to create narratives that damage community integration; 3) Young people, especially gen z, known as the linkster generation, who have a good understanding of digital literacy, are able to contribute to reducing the filter bubble effect in social media algorithms, so that the transmission of messages/content conveyed regarding constructive politics can be spread in social media algorithms that are freely consumed by the general public.

keywords: *Political Polarisation, Generation Z, Digital Media*

Article History: Received 12 January 2024, Revised 15 April 2024, Accepted 20 June 2024, Available online 30 October 2024

Pendahuluan

Tahun politik sudah semakin dekat dan mulai menunjukkan eksistensinya, dimana rakyat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi dan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara untuk menentukan siapakah yang selanjutnya akan memegang tongkat estafet sebagai pemimpin Indonesia. Pemilu yang diselenggarakan tepat pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang ini tidak hanya memilih siapa yang akan menggantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai pemimpin di Indonesia, tetapi kita juga diharuskan untuk memilih para anggota legislatif yang akan menjadi perwakilan dari rakyat Indonesia dan menduduki kursi parlemen.

Namun semakin dekat kita dengan tahun politik, maka semakin besar pula tantangan atau kendala yang dihadapi oleh masyarakat menjelang Pemilu 2024. Seperti halnya banyak kasus manipulasi pemilih dengan cara melakukan praktik-praktik yang cenderung intimidatif hingga kasus suap yang dapat menimbulkan public distrust pada integritas pemilu di Indonesia. Selain itu di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat, masalah disinformasi dan penyebaran berita hoaks menjadi salah satu kasus yang sulit untuk dikontrol

terutama menjelang tahun politik seperti saat ini. Walaupun penggunaan teknologi di Indonesia termasuk ke dalam kategori masif, namun masih banyak kasus-kasus yang belum bisa dijangkau oleh teknologi seperti polarisasi politik.

Polarisasi politik merupakan masalah turun-temurun yang belum mampu diselesaikan oleh para penyelenggara pemilu di Indonesia sejak tahun pertama pesta demokrasi pada tahun 2004 lalu. Meskipun beberapa pihak mengatakan bahwa polarisasi politik bisa dibilang menjadi perihai yang wajar terjadi pada berbagai negara yang menganut sistem demokrasi di dalam pemerintahannya, namun polarisasi politik tetap menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia yang diharapkan berjalan dengan damai dikarenakan polarisasi politik dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan lain, seperti politik identitas dan populisme. Keadaan semacam ini relevan dengan gagasannya McCarty yang menyatakan mengenai polarisasi politik merupakan penyakit dalam demokrasi suatu negara dan identik dengan hal-hal negatif seperti konflik, intoleransi serta ketegangan penduduk berkepanjangan sehingga dapat merusak struktur sosial masyarakat sebuah negara.¹

Meninjau kembali realitas sosial yang ada bahwa semakin dekat kita dengan pemilu 2024, sosial media justru menjadi media yang masif menyebarkan konten-konten yang mengandung unsur polarisasi politik seperti politik identitas dan ujaran kebencian yang dalam hal ini lebih sering ditujukan kepada pasangan capres dan cawapres 2024 mendatang. Hal ini dilakukan oleh oknum-oknum buzzer maupun simpatisan paslon yang tidak bertanggung jawab guna mengambil simpati maupun menggiring opini masyarakat terutama generasi z. Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini pasar politik bagi para partai maupun kandidat capres-cawapres adalah para generasi z. Menurut penelitiannya Alvara Research Center yang dilaksanakan di bulan Januari 2023 generasi z termasuk ke dalam digital native atau

¹ Nashrullah, J. "Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum." *Realism: Law Review*, 1(2), (2023): 22.

pengguna internet terbesar dengan jumlah persentase 97,7% dari keseluruhan sekitar 212,9 juta pemakai internet di Indonesia.²

Generasi muda atau biasa kita sebut dengan generasi z (gen- z) ialah satu generasi yang kelahirannya sekitar tahun 1995-2010. Generasi ini memiliki sifat yang cenderung sama dikarenakan latar belakang demografi, waktu dan keadaan sosial. Gen-z memiliki karakter yang menyukai hal-hal instan, unik, realistis dan menyukai tantangan sehingga mereka termasuk ke dalam golongan yang tidak takut akan perubahan terlebih menurut mereka perubahan bukan merupakan sesuatu yang menakutkan dan mudah dilalui karena adanya teknologi disekitar mereka.³

Penelitian ini menjadi penting mengingat generasi z sangat dekat sekali dengan teknologi terutama media digital selain itu kesadaran dan ketertarikan generasi z terhadap isu-isu politik pun sebenarnya cenderung tinggi namun sayangnya hal itu justru dijadikan alat pemecah belah dan polarisasi politik hanya untuk mendapatkan kepentingan segelintir orang. Generasi z yang masih awam akan politik dan cenderung independen justru pandangan poitiknya dibatasi hanya demi keperluan framing segelintir kelompok. Bahkan dewasa ini jarang sekali kita menemukan media masa yang independen dan tidak memihak pada kubu politik manapun.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan dan dinamika politik yang terjadi pada sistem demokrasi di Indonesia khususnya adalah masalah polarisasi seperti yang terjadi pada pilkada DKI Jakarta beberapa tahun silam hingga masalah polarisasi politik pada pemilu 2019 yang dampaknya dapat dirasakan hingga pasca pemilu seperti munculnya berita-berita hoaks tentang jokowi anak PKI. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tentang cara pencegahan yang dapat dilakukan oleh generasi z untuk menangani polarisasi politik berbasis media digital, mengingat lagi-lagi generasi z merupakan

² Fathurochman, N. Y., & Tutiasri, R. P. "Penerimaan Generasi Z terhadap Polarisasi Politik." *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), (2023): 6839.

³ Annamaria, T. *Z Generation: Clinical Psychological Phenomena and Socio-Psychological Aspect In The Information Age*. (Budapest: Tericum, 2011).

generasi yang paling dekat dengan media digital dan masih banyak dari mereka yang belum terikat pada kubu manapun, sehingga mereka lah golongan yang paling mungkin untuk melakukan mitigasi atau pencegahan terhadap polarisasi politik di media digital.

Landasan Teori

Berbicara mengenai theoretical framework, penulis mengutip sebuah teori yang menjelaskan terkait keterpengaruhan partisipasi dalam struktur masyarakat digital yang menurut Slamet dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahap, yakni:

1. Partisipasi politik, dimana salah satu bentuk pengaruh yang melibatkan masyarakat dalam upaya intervensi pemilihan calon legislatif maupun eksekutif, serta ikut andil dalam proses- proses kebijakan pemerintah.
2. Partisipasi sosial, yang dapat dilakukan dengan mencanangkan program-program yang sifatnya kolektif dan edukatif, serta mampu menggerakkan massa.
3. Partisipasi masyarakat, dibuktikan dengan tingkat kesadaran yang tinggi dan kritis, sehingga mampu menciptakan manusia-manusia merdeka yang bertindak sebagai kontrol bagi kinerja para stakeholder dan aktor politik.⁴

Selanjutnya dalam konteks politik destruktif yang salah satunya adalah maraknya praktek polarisasi politik, disinyalir dapat menjadi batu penghalang bagi perhelatan kontestasi politik yang semestinya menjunjung tinggi prinsip sportivitas dan keteraturan (rules of law). Menukil pandangan dari McCoy dan Somer yang menggambarkan polarisasi sebagai proses dimana terjadinya diferensiasi dalam society, sehingga terjadinya multiperspektif dan dissenting opinion yang berada dalam satu dimensi dan berakhir menjadi perlawanan antara pihak yang mendukung dan menentang.⁵ Selanjutnya terdapat studi

⁴ M. Slamet, *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, IPB Press, Bogor, 2003, hal. 10.

⁵ Jennifer Mc Coy, M.Somer, "Toward a Theory of Pernicious Polarization and How It Harms Democracies: Comparative Evidence and Possible Remedies", *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, (vol.1, No.1, 2019), pages. 30-32.

lain yang dilakukan oleh Slater dan Arugay yang mengamati polarisasi politik sebagai konsekuensi dari praktek di ranah eksekutif yang menimbulkan dua kelompok kontras dalam menyikapi pemerintahan. Yaitu kelompok pemuja dan kelompok penentang kekuasaan.

Kemudian secara paradigma teoritis, terdapat tiga jenis keresahan masyarakat yang timbul akibat maraknya politik identitas baik pra-kontestasi hingga pasca kontestasi yaitu:

1. Crisis of representative: terjadinya proses alineasi atau keterkucilan golongan masyarakat yang dinilai inferior dan tidak mampu terwakilkan aspirasinya.
2. Economic anxiety: terjadinya kecemasan sosial dalam aspek ekonomi akibat public distrust masyarakat terhadap aktor politik yang dicap sebagai “lintah darat”.
3. Culture distortion: terciptanya disintegrasi masyarakat akibat kurang harmonisnya dan maraknya perilaku disputasi antar umat beragama dan terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) antara gerakan populis dan negara, serta antara pertarungan ideologi sesama umat beragama.⁶

Dari beberapa teori dan studi di atas, menyiratkan bahwa teori tentang polarisasi politik adalah memuat perhatian tentang bagaimana motif operasional dari terwujudnya polarisasi politik itu muncul yang diakibatkan oleh perbedaan persepsi antar masyarakat dalam menyikapi kontestasi politik yang didalamnya terdapat figur-figur, maupun aktor politik yang menampilkan berbagai citra sesuai dengan tipologi dan antropologis masyarakat tersebut. Selain itu, faktor institusional dalam potret kepemimpinan lembaga eksekutif juga turut andil dalam menciptakan spektrum politik identitas yang kian masif. Hal ini dibuktikan dalam kedua kutub dalam masyarakat yang tergabung dalam kelompok pro maupun kelompok kontra dalam menyikapi berbagai kinerja pemerintahan dari petahanan.

⁶ Nolan McCarty, *Polarization: What Everyone Needs To Know*, Oxford University Press, 2019, pages 130-133.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menelusuri berbagai referensi terhadap objek penelitian, yang kemudian diberikan dalam bentuk deskripsi. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk menjelaskan teori-teori dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Studi literatur diperlukan untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian. Riset dan metodologi yang digunakan oleh para peneliti tidak berjalan mulus tanpa dasar *theoretical framework*.⁷

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Polarisasi Politik Beserta Social Anxiety Menjelang Pemilu 2024

Eksistensi polarisasi politik yang kerap menyasar kepada masyarakat di lingkup digital bisa ditandai dengan munculnya sebuah pendapat publik yang kian terpisah-pisah sekaligus sudah disebarkan melalui media sosial. Perihal demikian mempunyai dampak terhadap timbulnya suatu pandangan-pandangan yang berbeda secara jelas sekaligus membuat masyarakat berperilaku secara aktif dalam dunia politik.

Sebagaimana dalam penelitiannya Naura Yusro Fathurochman dan dan Ririn Puspita Tutiasri telah menjelaskan bahwa terdapat salah satu politisi yang menganggap polarisasi politik merupakan suatu hal yang normal dilakukan, politisi itu ialah Anies Baswedan yang menyatakan bahwa polarisasi dapat dikatakan sebagai sebuah argumen seseorang yang berbeda satu sama lain, sehingga menjadi kewajiban ketika berkompetisi pada ranah perpolitikan. Beberapa orang juga mempunyai asumsi bahwasannya terjadinya polarisasi politik yang mengikutsertakan konfrontasi di antara pihak pertama yang mendukung calon pemimpin politik dengan pihak yang

⁷ William Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Pearson Education, 2014, pages 213.

mendukung calon pemimpin politik lainnya tak dilarang serta sudah menjadi keadaan yang wajar-wajar saja apabila muncul ketidaksamaan pandangan dengan syarat tak dijadikan sebagai perilaku yang fanatik serta berlebihan yang mengesampingkan sebuah batasan-batasan berupa regulasi yang telah diberlakukan pada perhelatan pemilu.⁸

Namun faktanya, terjadinya polarisasi dalam waktu yang amat panjang dapat berdampak negatif sekaligus mengancam terhadap negara yang melangsungkan sistem demokrasi. Sama halnya yang telah diutarakan oleh Eve Warburton berkenaan dengan polarisasi yang bisa mengikis, merusak, maupun merobohkan institusi-institusi demokrasi. Dewasa ini, eksistensi polarisasi politik yang terjadi pada Negara Republik Indonesia selalu meningkat. Awal peningkatannya bisa dilihat saat menjelang pemilihan Presiden tahun 2014. Dalam pemilihan ini, seluruh masyarakat hanya disodorkan pilihan-pilihan yang telah dibatasi, lantaran adanya sistem pilpres yang meningkatkan persentase PT (Presidential Threshold)/ ambang batas, sehingga hanya terdapat dua pasang bakal calon presiden-wakil presiden yang sudah mencapai pemenuhan syarat itu.

Ketika dilaksanakan perhelatan pilkada DKI Jakarta tahun 2017, polarisasi politik yang menasar pada masyarakat mengalami peningkatan secara drastis pasca adanya permainan isu-isu SARA maupun spektrum politik identitas. Perhelatan pilkada ini bisa dibilang sebagai episode terusan setelah kemenangan Jokowi pada pemilihan presiden 2014 yang akhirnya memberikan kesempatan kepada Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) untuk menjadi Gubernur DKI dikarenakan Jokowi harus melepas jabatan sebelumnya sebagai gubernur. Akan tetapi, banyak kelompok masyarakat yang tidak terima jika Ahok memimpin DKI, satu di antaranya adalah kelompok Islam Fundamental yang melakukan protes atau penolakan. Menurut kelompok Islam

⁸ Fathurochman, N. Y., & Tutiasri, R. P. (2023). Penerimaan Generasi Z terhadap Polarisasi Politik. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6837-6845. Hlm. 6838.

Fundamental, Ahok merupakan individu yang beretnis Tionghoa (etnis minoritas) serta non-muslim yang wajib dilakukan perlawanan.

Tak berhenti di situ saja, polarisasi semakin menguat pasca kampanye Ahok di wilayah Kepulauan Seribu yang diduga sudah melakukan penodaan agama dengan mengolok-olok salah satu ayat pada kitab sucinya umat muslim yaitu Al Qur'an. Selanjutnya, Ahok tak bisa memenangkan Pilkada DKI tahun 2017 lantaran adanya aksi dari gerakan 411 maupun gerakan bela Islam 212 yang menuntut Ahok supaya segera dipenjara oleh pihak yang berwajib. Terlebih perhelatan ini pun mendatangkan pengaruh terhadap terselenggaranya Pilkada pada daerah-daerah lainnya sampai dengan menjelang perhelatan pemilihan Presiden di tahun 2019.

Tak hanya itu, polarisasi politik juga terjadi pada pemilihan presiden tahun 2019 dengan beragam wujud, misalnya Islam Tradisional vs Islam Revivalis; cebong vs kampret; PKI vs kadrung yang berhasil mewarnai persoalan kehidupan kolektif masyarakat, baik melalui kehidupan nyata maupun media-media digital.⁹ Namun, masifnya kemajuan teknologi informasi, membuat polarisasi lebih banyak terjadi di media digital dibarengi maraknya buzzer-buzzer yang tak bertanggung jawab dengan membuat suatu strategi-strategi jitu dalam melangsungkan komunikasinya terhadap warganet, berupa melakukan pendiskreditan (fitnah), membuat banyak individu tidak percaya, melakukan penghalangan sekaligus keresahan dengan menyebarkan informasi yang tidak jelas, melakukan serangan bahkan bisa berkampanye hitam terhadap kandidat lainnya.

Buzzer-buzzer politik memungkinkan akan menggiring kontestasi demokrasi pada arah yang berorientasi tak baik sekaligus menimbulkan kesesatan. Keadaan semacam ini bisa terjadi dikarenakan media digital telah menjadi instrumen yang mudah

⁹ Opcit. Nashrullah. J. 22-26.

dipakai dalam menyebarkan kebencian secara cepat dan tak memakan biaya mahal.¹⁰

Dilihat dari berbagai pengalaman yang pernah ada telah menunjukkan bahwasannya polarisasi politik bukanlah suatu persoalan yang tak mungkin terjadi, sehingga kemungkinan juga membawa dampak-dampak negatif sekaligus menjadi kuat menjelang pertarungan pemilu tahun 2024 yang akan diadakan serentak. Terdapat rasa khawatir yang amat besar terkait eksistensi polarisasi politik yang semakin meluas dikarenakan bisa mengancam tingkat kepercayaan masyarakat yang memungkinkan mengalami penurunan atau perusakan, sedangkan perilaku saling mempercayai satu dengan lainnya bisa disebut sebagai unsur yang paling mendasar melalui modal sosial untuk terwujudnya sistem demokrasi yang sehat.¹¹

Rasa khawatir yang dimunculkan oleh setiap masyarakat jelang pemilu 2024 tentunya diiringi dengan alasan tertentu. Kebanyakan masyarakat menyatakan bahwa polarisasi politik yang diikuti dengan ujaran-ujaran permusuhan maupun kedengkian, memungkinkan kedepannya bisa merobohkan sistem demokrasi yang telah dijalankan oleh pemerintahan Indonesia dengan baik. Berbagai bentuk pengalaman yang telah terjadi dari pemilu 2014 hingga 2019 dapat dibilang sebagai sebuah catatan-catatan buruk yang mampu mendatangkan rasa trauma di kalangan masyarakat Indonesia.¹²

Rasa khawatir yang berlebihan ini apabila diabaikan begitu saja pada jarak waktu yang lama/ panjang tentu dapat menimbulkan rasa trauma dan public distrust terhadap demokrasi di Indonesia. Untuk itu guna menanggulangi rasa khawatir ataupun trauma yang besar pada

¹⁰ Umam, M.K. [matabanua.co.id](https://matabanua.co.id/2023/08/13/hantu-buzzer-menjelang-pemilu-2024/). "Hantu Buzzer Menjelang Pemilu 2024." (2023).
<https://matabanua.co.id/2023/08/13/hantu-buzzer-menjelang-pemilu-2024/>.

Diakses pada tanggal 20 November 2023. Pukul 19.44 WIB.

¹¹ Fernando, Z. J., Pratiwi, W., & Saifulloh, P. P. A. Model Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Ancaman Polarisasi Politik Pemilu 2024 di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*. (2022, December): 125.

¹² Sakti. E.R. "Tantangan Menepis Polarisasi Politik Pemilu 2024." Kompas. 2023.
<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/07/10/tantangan-menepis-polarisasi-politik-pemilu-2024>. Diakses pada tanggal 20 November 2023. Pukul 21.16 WIB.

masyarakat, maka diperlukan suatu peranan aktif dari gen-z sebagai agent of change dan predikat mayoritas pengguna media digital.

Tindakan Preventif Generasi Muda Menghadapi Polarisasi Politik Media Digital

Generasi muda atau yang biasa disebut dengan gen-z merupakan aspek terpenting dalam pengumpulan aktivitas ruang publik yang kini seolah terjadi transisi ke arah digital, sehingga dialektika komunikatif bersua dalam ruang-ruang tanpa sekat. Ruang publik yang tersedia di masyarakat adalah sebuah ruang berbasis privat yang sifatnya ekuilibrium dengan publik, sehingga terjadinya agregasi kebutuhan dan kepentingan antar masyarakat, maupun pemerintah.¹³ Pada tahun politik yang akan dihelat, potensi terjadinya distorsi etika dan moralitas diprediksi akan terjadi dengan multiperspektif diiringi disinformasi dan misinformasi yang bertebaran di media digital dengan ciri khas masifnya tingkat destruktifitas dan *toxicity*.¹⁴

Melalui media digital dengan tingkat pengguna yang didominasi oleh gen-z ini, diharapkan mampu ekuivalen dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan gen-z dapat menjadi indikator dalam upaya menaikkan grafik demokrasi Negara Indonesia menuju demokrasi yang substansial lewat aktifnya partisipasi politik dalam ruang-ruang digital. Selaras dengan itu, secara esensi partisipasi menjadi penanda bahwa telah terjadi pergeseran budaya politik ke arah modernisasi dan tingkat signifikansi maju tidaknya demokrasi di suatu negara, ditentukan oleh parameter partisipasi dalam diri masyarakat.¹⁵

Selain itu, partisipasi politik yang dapat dibangun oleh gen-z dalam domain media sosial dapat menjadi pembeda, ketimbang

¹³ Habermas, J. *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana. (1989): 41).

¹⁴ Kadir, N. Media Sosial dan Politik Partisipatif : Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*. (2022): 207.

¹⁵ Nelson, S. H. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1994). 105.

partisipasi yang sifatnya konvensional, pasalnya melalui media sosial, masing-masing perorangan dapat mengonstruksi relasi hubungan yang lebih fleksibel dan cair tanpa terhalang batasan waktu dan media sosial dapat menjadi tempat untuk meluapkan aspirasi, gagasan, kritikan dan solusi yang dapat diakses secara terbuka dan ekspresif. Di lain sisi, justru media sosial dapat menjadi tantangan bagi kandidat, aktor politik, maupun partai politik dalam upaya me-manage algoritma media sosial dan menyuguhkan konten berbau promosi/ pencitraan kepada khalayak umum karena tingkat kritisisme melalui media sosial dapat menjadi pukulan telak bagi partai politik, apabila konten yang disuguhkan menuai kontroversi dan tidak dapat diterima masyarakat luas.¹⁶

Secara empiris, public discourse (wacana publik) khususnya di Indonesia yang dilansir dari Katadata.co.id, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia dalam website traffic (informasi menyangkut aktivitas situs) pada media digital terutama media sosial adalah sebanyak 73% yang sudah melakukan akses informasi.¹⁷ Data ini menandakan bahwa intensitas dalam transaksi informasi dan komunikasi lebih banyak terjadi pada media sosial, tak terkecuali konten-konten yang berkaitan erat dengan tahun politik yang tidak lama lagi akan terjadi. Selanjutnya masalah yang dihadapi jelang pemilu adalah terjadinya banyak kecurangan, khususnya di media sosial yang bertebaran hoaks, ujaran kebencian yang dialamatkan kepada kandidat lainnya dan terjadinya disintegrasi masyarakat akibat polarisasi. Hal ini dipertegas dengan penemuan yang dikutip dari IDNTimes.com bahwa menjelang tahun pemilu telah ditemukan

¹⁶ Pratiknyo, A. D. Partisipasi Masyarakat Digital Sebagai Tantangan Baru Untuk Pemilu Indonesia. *Jurnal Etika & Pemilu*, (2022): 35.

¹⁷ Annur, C. M. *Katadata Media Network*. Diambil kembali dari databoks. (2022, Januari 20). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/survei-kic-mayoritas-masyarakat-indonesia-mengakses-informasi-di-media-sosial>.

sebanyak 1.471 konten berbau hoaks yang telah ada dalam rentang waktu tahun 2018- 19 September 2023.¹⁸

Melihat realitas di atas, sepatutnya dapat dijadikan bahan kontemplasi dan evaluasi untuk penyelenggaraan dan aktivitas politik yang semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Beban berat yang ada dalam perpolitikan Indonesia, setidaknya menjadi tantangan bagi generasi muda dalam upaya mencegah politik destruktif, salah satunya melalui pemanfaatan media digital. Penulis berpikir sekiranya beberapa ide bagi generasi muda dalam upaya preventif mencegah polarisasi politik adalah dengan mulai menanamkan mindset kepada generasi muda bahwasanya posisi anak muda sekarang dan seterusnya adalah sebagai agent of social control yang harapannya bisa bertindak sebagai pengawas sosial digital dan edukator politik bahkan generasi muda wajib ikut andil menjadi influencer dengan membuat konten-konten netral yang berbasis akademis bukan tendensi, sehingga generasi muda mampu menjadi wise content creator. Contoh beberapa channel generasi muda yang eksis mengedukasi masyarakat luas, seperti Total politik, Edupolthink dan Pinter Politik. Selain itu, generasi muda saat ini juga dihadapkan oleh praktik yang memecah belah bangsa lewat buzzer yang dinilai merugikan keutuhan masyarakat, sehingga ini menjadi tugas generasi muda yang bertindak sebagai antitesis buzzer dalam upaya menggiring opini yang baik dan benar dengan melakukan penguatan secara paradigma argumentatif, bukan sentimen.

Dengan demikian, gen-z termasuk ke dalam kategori linkster generation dan digital native yang sejak dini sudah bergelut dengan teknologi informasi, sehingga perlu bagi generasi muda ini, dilakukan penanaman literasi digital sejak dini guna meminimalisir efek filter bubble dalam sistem algoritma media sosial, sehingga transmisi pesan/ konten positif yang disampaikan berkenaan dengan politik yang sifatnya konstruktif mampu tersebar ke dalam algoritma media

¹⁸ Nafi'an, M. I. *IDN Times*. Diambil kembali dari IDN Times. (2023, September 20). <https://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-ilman-nafian-2/menkominfo-beberkan-data-informasi-hoax-jelang-pemilu-2024?page=all>.

sosial, serta menjadi konsumsi bagi khalayak luas berbasis digital culture.

Kesimpulan

Pada intinya, tantangan pemilu yang ada di 2024 tidak akan lepas dari potensi terjadinya polarisasi politik. Hal ini ditengarai karena Indonesia merupakan negara yang heterogen, sehingga intensitas konflik dapat tersulut begitu cepat. Menilik aspek historis perpolitikan di Indonesia telah menjelaskan bahwasanya menuju pemilu dan pilkada masih diwarnai dengan konflik dan isu-isu problematik, seperti penyebaran berita hoaks, penggunaan politik identitas, terjadinya disinformasi dan misinformasi dalam ranah digital. Pilkada DKI tahun 2017 dan Pilpres 2019 telah memicu terjadinya rasa traumatis di kalangan publik, sehingga menimbulkan maraknya perilaku apatis dan pesimisme, khususnya di kalangan generasi muda.

Kemudian fenomena polarisasi tidak berhenti di situ saja. Pada kesimpulan ini, penulis juga menambahkan beberapa temuan polarisasi yang mengandung unsur eksploitasi, seperti generasi z ini hanya dimanfaatkan oleh para petinggi partai untuk mendulang suara, bukan sebagai sarana perbaikan politik di Indonesia, serta keterbatasan gen-z dalam bergerak di ranah eksekutif maupun legislatif karena dianggap belum memiliki pengalaman dan masih maraknya fenomena dinasti politik dan patronasi di Indonesia.

Solusi yang dapat dimaksimalkan guna mencegah polarisasi politik pada pemilu 2024 di antaranya adalah memanfaatkan partisipasi aktif dari generasi muda, di antaranya adalah generasi z. Gen-z adalah generasi futuristik yang diharapkan mampu mengubah tatanan ekosistem politik Indonesia yang dari awal suram menuju kepada politik yang konstruktif. Sebagai generasi yang diharapkan memiliki peran aktif dalam perbaikan demokrasi di Indonesia, seharusnya dapat mengoptimalkan literasi digital sebagai upaya untuk mengurangi adanya polarisasi yang marak terjadi di ranah sosial digital dengan berbagai pendekatan. Peranan generasi muda dapat dimulai dengan keaktifan generasi muda menjadi counter yang efektif

bagi oknum-oknum yang berselimut menjadi buzzer, sehingga pemilu 2024 dapat menjadi wasilah bagi adanya transformasi ekosistem politik yang lebih baik dibandingkan wajah politik yang dihadirkan sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Annamaria, T. Z. "Generation: Clinical Psychological Phenomena and Socio-Psychological Aspect In The Information Age. Budapest: Tericum. 2011.
- Annur, C. M. "Katadata Media Network. Diambil kembali dari databoks." 2022.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/survei-kic-mayoritas-masyarakat-indonesia-mengakses-informasi-di-media-sosial>.
- Fathurochman, N. Y., & Tutiasri, R. P. "Penerimaan Generasi Z terhadap Polarisasi Politik." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), (2023): 6837-6845, <https://doi.org/10.24853/pk.4.2.167-185>
- Fernando, Z. J., Pratiwi, W., & Saifulloh, P. P. A. (2022, December). Model Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Ancaman Polarisasi Politik Pemilu 2024 di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (pp. 120-132).
- Habermas, J. *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 1989.
- Jennifer Mc Coy, M. "Toward a Theory of Pernicious Polarization and How It Harms Democracies: Comparative Evidence and Possible Remedies." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, (2019): 30-32.
- Kadir, N. "Media Sosial dan Politik Partisipatif : Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, (2022): 207-208, <http://dx.doi.org/10.29303/resiprokal.v4i2.225>.

- McCarty, N. *Polarization: What Everyone Needs To Know*. Oxford University Press. 2019.
- Nafi'an, M. I. "IDN Times. Diambil kembali dari IDN Times". 2023. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-ilman-nafian-2/menkominfo-beberkan-data-informasi-hoax-jelang-pemilu-2024?page=all>.
- Nashrullah, J. "Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum." *Realism: Law Review*, 1(2), (2023): 20-38.
- Naura Yusron Fathurochman, R. P. Penerimaan Generasi Z terhadap Polarisasi Politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), (2023): 6837-6845, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2833>.
- Nelson, S. H. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Neuman, W. L. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education. 2014.
- Pratiknyo, A. D. "Partisipasi Masyarakat Digital Sebagai Tantangan Baru Untuk Pemilu Indonesia." *Jurnal Etika & Pemilu*, (2022): 70-75.
- Sakti. E.R.. "Tantangan Menepis Polarisasi Politik Pemilu 2024." Kompas. 2023. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/07/10/tantangan-menepis-polarisasi-politik-pemilu-2024>. Diakses pada tanggal 20 November 2023. Pukul 21.16 WIB.
- Slamet, M. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press. 2003.
- Umam, M.K. matabuana.co.id. "Hantu Buzzer Menjelang Pemilu 2024." 2023. <https://matabanua.co.id/2023/08/13/hantu-buzzer-menjelang-pemilu-2024/>. Diakses pada tanggal 20 November 2023. Pukul 19.44 WIB.